

Dampak bencana *corona virus disease* 2019 (covid-19) terhadap beban perempuan Indonesia dalam menjalankan peran

Diah Wahyuningsih^{a,1,*}, Dian Tias Aorta^{a,2}

^a Institut Studi Islam Muhammadiyah Pacitan, Jl. Gajah Mada No. 20 Baleharjo, Pacitan 63511, Indonesia

¹ diah18@isimupacitan.ac.id *; ² kilisuci.wicaksono@gmail.com

* corresponding author

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel

Diterima: 10 Mei 2023

Direvisi: 1 September 2023

Diterbitkan: 30 September 2023

Kata Kunci

Corona virus disease (covid-19)

Perempuan Indonesia

Peran

ABSTRAK

Adanya bencana covid-19 menimbulkan ketimpangan-ketimpangan yang dialami perempuan jelas sangat tidak proporsional, mulai dari bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan kesehatan bahkan dampak terhadap para pekerja wanita. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) dampak Covid-19 bagi perempuan dalam menjalankan peran dan (2) faktor-faktor yang mendorong terjadinya ketimpangan peran wanita dengan laki-laki akibat adanya covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi terhadap sampel penelitian. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak Covid-19 bagi peran perempuan sangat luas mulai dari bidang pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan bahkan bagi pekerja migran wanita, sedangkan faktor yang mempengaruhi terjadinya ketimpangan peran perempuan dan laki-laki akibat covid-19 ialah budaya patriarki yang sangat kental.

This is an open access article under the CC-BY-SA license.



Sitasi Jurnal: Wahyuningsih, D., & Aorta, D.T. (2023). Dampak bencana corona virus disease 2019 (covid-19) terhadap beban perempuan Indonesia dalam menjalankan peran. *Jurnal Komunikasi Sosial Budaya*, 1(2), 51-56

1. Pendahuluan

Coronavirus (CoV) adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus Disease (COVID-19) adalah virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

Seperti kita ketahui pada awal tahun 2020, COVID-19 menjadi masalah kesehatan dunia. Kasus ini diawali dengan informasi dari Badan Kesehatan Dunia/World Health Organization (WHO) pada tanggal 31 Desember 2019 yang menyebutkan adanya kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kasus ini terus berkembang hingga akhirnya diketahui bahwa penyebab kluster pneumonia ini adalah novel coronavirus. Kasus ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadi importasi di luar China. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID19 sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus pada manusia ini dengan sebutan Coronavirus Disease (COVID-19). (Jogloabang, 2020). Virus corona menyebar luas dengan sangat cepat dan sangat berbahaya karena penularannya yang mudah dan belum ditemukan

obatnya. Untuk memutus rantai penularannya, pemerintah membuat kebijakan untuk meminimalisir penularan virus.

Kebijakan pemerintah dalam rangka memutus rantai penyebaran Covid-19 yaitu *physical distancing*, kampanye *stay at home*, bahkan saat ini pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No.9 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019. Hal ini dilakukan karena penyebaran virus yang sangat cepat sehingga mengharuskan setiap negara menetapkan beberapa kebijakan agar meminimalisir penularan virus tersebut.

Sinyal politisasi dari pemerintah sangatlah terasa, sepak terjang kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menangani virus covid-19 bisa dibilang bersifat terpusat di Kementerian Kesehatan, sehingga informasi terkait covid-19 menjadi sangat eksklusif. Hal ini dapat kita lihat bahwa pemerintah merasa tidak perlu memberikan informasi bahkan menutupi informasi kepada warga terkait tempat penyebaran corona dan korban, dengan adanya hal ini kita dapat pahami secara politik bahwa dengan menutupi informasi serta memusatkan penanganan covid-19 merupakan salah satu monopoli informasi. Kejadian seperti ini sejalan dengan pemikiran Harold Adams Innis Profesor Ekonomi Politik asal Kanada mencetuskan sebuah istilah atas penguasaan pengetahuan dan informasi, yakni monopoli pengetahuan (*monopolies of knowledge*). Dengan begitu, hal ini menjadi bukti bahwa informasi menjadi sangat eksklusif. Disamping itu, saat pandemi menyerang hal ini dijadikan ajang perang politik, adu argument politik dan mencari panggung dikancah politik, dimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah saling tarik ulur dalam penanganan covid -19, bahkan saling adu taat dalam penanganan virus ini. Bahkan pemerintah memamfaatkan keadaan saat ini untuk mencoba mensahkan Undang-Undang yang mendapat penolakan keras dari rakyat.

Oleh karena itu, dari uraian di atas menunjukkan besar sekali dampak yang ditimbulkan covid-19, penyebaran yang sangat cepat menjadikan virus covid-19 hantu bagi Indonesia bahkan dunia, sumber kecemasan Indonesia dan dunia, bahkan menjadi momok yang sangat menakutkan di setiap negara. Hal ini menunjukkan dunia sedang dilanda kekhawatiran dan dengan begitu pemerintah Indonesia harus lebih cepat dalam menangani virus ini. Semakin cepat melakukan penanganan maka dampak disektor ekonomi, sosial, budaya bahkan politik akan segera membaik.

Namun yang menjadi sorotan ialah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sangat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Termasuk pada perempuan diberbagai bidangnya. Dampak yang ditimbulkan juga sangat signifikan. Kaum perempuanlah yang cenderung lebih besar terkena dampaknya secara tidak proporsional. Hal senada juga dikatakan oleh (Maria Holtsberg: 2020) penasihat bidang Kemanusiann dahn bencana UN Women Asia dan Pasific bahwa “Krisis selalu memperburuk ketimpangan gender.” (Tambunan, 2020).

Ketimpangan-ketimpangan yang dialami perempuan jelas sangat tidak proporsional, mulai dari bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan kesehatan bahkan dampak terhadap para pekerja wanita. Hal ini atas menunjukkan bahwa wanita merupakan salah satu kaum rentan yang wajib dilindungi, sehingga wanita dapat menjalankan perannya yang sangat urgent bagi suatu bangsa. Hal senada juga dikatakan oleh Ir. Soekarno bahwa ia menafsirkan perempuan dalam sepenggal kalimat yang berbunyi “perempuan itu tiang negeri”. Hal ini tentunya membuat kedudukan perempuan menjadi sangat penting untuk mencetak peradaban (Soekarno, 2001). Bung Hatta memberikan penguatan pendapat bahwa “siapa yang mendidik satu laki-laki berarti telah mendidik satu manusia, sedangkan siapa yang mendidik satu perempuan berarti mendidik satu generasi”. Demikian peran perempuan yang sangat urgent serta dampak Covid-19 bagi wanita dalam menjalankan perannya.

Wanita dengan perannya kerap kali mengalami dampak sosial yang berlipat dari laki-laki di tengah kondisi isolasi di rumah akibat pandemi Covid-19 karena harus memegang beban ganda. Peran perempuan yang sangat urgent di sektor rumah tangga dimana semua pengaturan wanitalah yang mengakomodir, namun ditengah pandemi peran wanita dalam mengakomodir tidak seperti biasanya sehingga mengakibatkan dampak ketimpangan-ketimpangan di berbagai sektor, seperti pendidikan, ekonomi, sosial, dan lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka permasalahan dampak ketimpangan-ketimpangan terhadap perempuan ditengah pandemi Covid-19 perlu untuk dibahas. Bagaimana dampak Covid-19 bagi beban perempuan dalam menjalankan peran? Lalu faktor-faktor apa saja yang menyebabkan ketimpangan peran laki-laki dan perempuan akibat adanya covid-19? Oleh karena itu, permasalahan-permasalahan ini lah yang akan dibahas dalam tulisan ini.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif untuk mengungkapkan dampak covid-19 terhadap beban perempuan dalam menjalankan perannya. Sampel penelitian ditentukan melalui *random sampling* terhadap perempuan Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi terhadap sampel penelitian. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara analisis deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan bagaimana dampak dari adanya bencana covid-19 terhadap beban perempuan dalam menjalankan perannya.

3. Hasil dan Pembahasan

Pandemi Corona Virus Disease 19 (COVID-19) ini layaknya sebuah ledakan bom yang menghantam dunia dan menimbulkan rasa panik, takut, dan ketidakberdayaan global yang sangat hebat. Rasa takut terhadap virus itu telah menyebabkan seluruh tempat diisolasi tanpa terkecuali. Akibatnya, muncul rasa kekhawatiran masyarakat yang menyebabkan tertutupnya segala relasi sosial, politik, ekonomi, dan budaya global yang mana merupakan sebuah proses de-sosialisasi masif masyarakat global. Berbagai negara bahkan menutup rapat (lockdown) dan memalangi diri, yang mana merupakan sebuah bentuk proses isolasi diri dari negara itu sendiri. Aktivitas ekonomi, seperti produksi, distribusi, dan konsumsi melambat, bahkan beberapa dihentikan sementara sampai dengan waktu yang tidak dapat ditentukan. Serta aktivitas pendidikan yang terganggu menyebabkan seluruh pelajar wajib melaksanakan bentuk pendidikan jarak jauh. Sementara, aneka bentuk aktivitas budaya, khususnya olahraga dan hiburan dihentikan.

Saat ini, masyarakat dilingkupi dengan ketidakpastian dan kekhawatiran. Dalam situasi ini dampak Covid-19 bagi perempuan sangat terlihat dengan jelas. Ketimpangan-ketimpangan yang dialami perempuan jelas sangat tidak proporsional, mulai dari bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan kesehatan bahkan dampak terhadap para pekerja wanita. Hal ini atas menunjukkan bahwa wanita merupakan salah satu kaum rentan yang wajib dilindungi, sehingga wanita dapat menjalankan perannya yang sangat urgent bagi suatu bangsa.

Dalam norma gender yang patriarki, perempuan tidak memiliki kekuatan membuat keputusan ketika wabah berlangsung, dan akibatnya sebagian besar kebutuhan umum, dan kesehatan reproduksi mereka tidak terpenuhi. Lebih dari itu bahkan perempuan tidak memiliki otonomi untuk membuat keputusan yang berhubungan dengan reproduksi mereka sendiri. Hal tersebut diperparah dengan terbatasnya sumber keuangan sehingga sulit bagi perempuan mengakses layanan kesehatan, baik untuk dirinya sendiri maupun bagi anak-anaknya. Dampak dari pandemi virus Covid-19, memberikan pengaruh yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Pandemi yang telah mendunia membuat ketidakadilan yang sudah dirasakan oleh perempuan dan kelompok marginal lainnya, seperti kelompok disabilitas, dan mereka yang memiliki ketidakmampuan ekonomi, kondisinya menjadi kian memburuk (Fairuz Nadia, 2020).

Menurut UNFPA, memahami ketidakadilan gender menjadi kunci untuk membangun kepekaan adanya potensi peningkatan risiko kekerasan berbasis gender dalam situasi bencana atau pandemi saat ini. Seluruh populasi merasakan imbas dari pandemi virus COVID-19, dan tentu saja setiap orang atau wilayah akan mengalaminya secara berbeda-beda. Dalam konteks situasi bencana dan perempuan, sebagaimana identifikasi UNFPA, sekitar 48 juta perempuan dan anak perempuan, termasuk 4 juta perempuan hamil, membutuhkan bantuan kemanusiaan dan perlindungan di tahun 2020 ini (United Nations Population Fund HQ, 2020).

Jika kita lihat dari aspek pendidikan, kebijakan pemerintah meniadakan pembelajaran dengan sistem tatap muka dimulai dari seluruh kegiatan pembelajaran dialihkan secara online. Hal ini tentunya berpengaruh bagi perempuan. Banyak perempuan yang mulai merasa ruang geraknya menjadi lebih terbatas dalam melakukan pembelajaran online ini. Orang tua perempuan/ibu memiliki beban lebih berat yaitu harus menemani anaknya belajar online dengan smartphone, mengajari anaknya dalam mengerjakan tugas dan PR yang sangat banyak, serta mengerjakan tugas-tugas sekolah lainnya yang harus dilakukan secara online. Beban perempuan menjadi sangat berat karena harus mengurus suami, memasak, membersihkan rumah, mengajari anak, SFH online, mencuci, dan mengurus kegiatan dapur lainnya. Dengan adanya pembelajaran online ini banyak ibu-ibu yang mengeluh karena harus ekstra membagi waktu dan peran untuk dapat menyelesaikan semua peran-perannya dalam rumah tangga. Selain itu, bagi mereka yang kurang memiliki signal bagus di tempat tinggalnya mengharuskan mereka untuk keluar rumah agar dapat tetap mengikuti sekolah online

(SFH). Hal inilah yang menjadi masalah karena banyak ibu-ibu yang kewalahan dalam membagi perannya di dalam mengurus rumah tangga.

Dari aspek sosial, dalam bidang sosial pergerakan wanita tentu tidak semudah biasanya, kegiatan para perempuan tertunda bahkan dibatalkan. Disisi lain kebijakan tetap dirumah meningkatkan angka kekerasan dalam rumah tangga yang mana perempuan menjadi korbannya. Selain itu, timbulnya rasa curiga dan hilangnya kepercayaan terhadap orang-orang yang ada diseputaran kita karena kecemasan terhadap wabah ini.

Secara umum, selama masa karantina di rumah, beban pekerjaan perempuan dalam rumah tangga semakin besar. Mulai dari menyiapkan makanan, mencuci pakaian, membersihkan rumah, menemani anak menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Bagi keluarga yang suaminya pekerja harian, perempuan semakin terbebani karena ia harus memeras pikirannya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, dimana suami sedang tidak bisa keluar rumah untuk mencari nafkah. Keluarga dengan norma gender yang diskriminatif pada perempuan, tidak mengenal yang namanya berbagi peran domestik antara suami-istri. Suami/laki-laki merasa tabu, atau merasa urusan rumah tangga tugasnya perempuan, walaupun saat itu sang suami sedang tidak bekerja. Dengan demikian pandemi virus COVID-19 membuat beban perempuan semakin berat.

Selanjutnya dampak dalam bidang kesehatan merekahlah garda terdepan dalam menangani Covid-19. Menurut WHO sekitar 70% pekerja sektor kesehatan berasal dari kaum perempuan. Para tenaga kerja medis perempuan pun rela kekurangan waktu untuk beristirahat, mereka tidak bertemu keluarga bahkan anaknya selama beberapa minggu ke depan demi membantu menangani Covid-19. (Aria, 2020). Angka diatas juga dapat menunjukkan besarnya dampak bagi perempuan, sehingga dapat dilihat siapa yang lebih beresiko tertular virus COVID-19. Tenaga kesehatan perempuan memberikan intervensi langsung pada pasien di fasilitas kesehatan primer, termasuk berada di garis depan dalam berinteraksi dengan masyarakat. Tetapi begitu yang membuat prihatin adalah mereka tidak sepenuhnya terlibat dalam membuat keputusan dan perencanaan intervensi, pengawasan keamanan, proses deteksi, dan mekanisme pencegahan. Melihat besarnya keterlibatan perempuan dalam dunia kesehatan, dan pengalaman perempuan dalam penanganan wabah yang pernah terjadi sebelumnya, menunjukkan pentingnya memasukkan analisis gender dalam persiapan dan respon suatu bencana. Selain untuk meningkatkan efektifitas dari intervensi kesehatan, juga untuk mendorong kesetaraan gender, dan mewujudkan keadilan pada layanan kesehatan.

Norma gender yang menempatkan perempuan sebagai perawat dalam keluarga, serta besarnya keterlibatan perempuan sebagai tenaga kesehatan, maka menjadi alasan kuat untuk melibatkan perempuan dalam perencanaan, serta menggunakan perspektif gender dalam dunia kesehatan. Para tenaga medis perempuan pun hatinya pasti hancur melihat keadaan seperti ini. Tidak hanya itu baru baru ini beredar kabar bahwa ada perawat di usir dari tempat tinggalnya. Masyarakat berfikir bahwa kembalinya mereka akan memperburuk keadaan yang sedang sulit ini, mereka beranggapan bahwa para tenaga medis akan menularkan virus dilingkungan sekitarnya.

Kemudian dampak dalam bidang ekonomi banyak perempuan yang kehilangan pekerjaannya bahkan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya karena tidak adanya penghasilan. Bahkan omset yang turun membuat beberapa pihak melakukan PHK untuk meminimalisir kerugian. Menurut persepektif UN Women, para perempuan ini yang akan merasakan dampak terbesar akibat dari Covid-19, termasuk penerimaan upah harian, pemilik usaha kecil dan mereka yang bekerja disektor informal.

Dalam konteks norma gender yang patriarki, laki-laki didapuk sebagai pencari nafkah utama. Dengan adanya pandemi virus COVID-19, pemerintah membuat kebijakan karantina guna memutus rantai penularan virus. Kebijakan tersebut membuat laki-laki berdiam di rumah, sehingga tidak dapat memenuhi norma gendernya sebagai pencari nafkah. Hal itu tentu menjadi tekanan tersendiri, baik dari dalam dirinya, maupun dari keluarganya yang juga mengaplikasikan norma gender patriarki dengan turut meyakini bahwa laki-laki adalah pencari nafkah utama. Dari realita tersebut berpotensi terjadinya ketegangan bahkan konflik dalam rumah tangga.

Bahkan dampak terhadap pekerja migran wanita sangat berpengaruh, para tenaga kerja wanita di luar negeri mereka kesulitan mendapatkan masker, bahan pokok, obat-obatan, dan linnya. Keadaan ini sangat menyulitkan juga mengkhawatirkan, bahkan beberapa tenaga kerja wanita harus tetap bekerja seperti biasanya ditengah wabah ini. Banyak pula yang tidak berpenghasilan karena mereka Lockdown dan harus tutup sementara. Keadaan inipun mempengaruhi keluarga mereka yang bergantung kepada penghasilan para tenaga kerja wanita diluar negeri.

Menurut data migrant care diperkirakan jumlah buruh migran Indonesia yang berada di luar negeri sebesar 4,5 juta orang. Sebagian besar diantara mereka adalah perempuan (sekitar 70 %) dan bekerja

di sektor domestik (sebagai PRT) dan manufaktur. Dari sisi usia, sebagian besar mereka berada pada usia produktif (diatas 18 tahun sampai 35 tahun). Selebihnya, sekitar 30% adalah laki-laki, bekerja sebagai buruh perkebunan, konstruksi, transportasi dan jasa. Angka yang cukup fantastis dimana pekerja migrant wanita sebagai penyelamat negara yakni pemasok devisa bagi negara, namun angka sebesar 70% memberika informasi bahwa sekitar 70% pekerja migran wanita terdampak saat pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil survei dampak Covid-19 terhadap PMI yang dilaksanakan oleh Human Rights Working Group (HRWG) bersama dengan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dan Jaringan Buruh Migran (JBM), sejumlah pekerja migran asal Indonesia mengaku mengalami pelanggaran hak kerja selama wabah virus corona, mulai dari pemutusan hubungan kerja (PHK), gaji tidak dibayar, ketakutan melaporkan kondisi kesehatan karena khawatir ditangkap oleh aparat keamanan akibat bekerja secara ilegal, bekerja ekstra tanpa diberikan insentif, hingga kelaparan. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa dampak yang diperoleh wanita saat covid sangat besar sehingga tidak proporsional.

Oleh karena itu, perempuan yang memiliki peran yang hebat diberbagi sektor bidang juga mengalami ketimpangan yang sangat besar juga. Bahkan hal ini pun berdampak sangat luas bagi seluruh lapisan masyarakat bahkan dunia. Dengan adanya pandemik ini peran negara dalam melaksanakan kewajiban untuk melindungi warganya telah diejawantahkan dalam pembukaan bahkan batang tubuh UUD NKRI Tahun 1945, yang seyogyanya dalam hal ini pemerintah dapat memberikan perlindungan kepada rakyat, khususnya bagi kaum rentan seperti wanita tentunya hal ini dapat menjadi bukti apakah suatu negara mampu atau tidak melindungi warganya, dengan adanya pandemik ini diharapkan bagi pemangku kekuasaan untuk membuktikan serta mengembalikan kepercayaan publik dalam penanganan pandemik.

4. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Dampak Covid-19 bagi peran perempuan sangat luas mulai dari bidang pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan bahkan bagi pekerja migran wanita.
- 2) Faktor yang mempengaruhi terjadinya ketimpangan peran perempuan dan laki-laki akibat covid-19 ialah budaya patriarki yang sangat kental.

Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menghadapi covid-19 harus memperhatikan aspek gender dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan bahkan bagi pekerja migran wanita, agar perempuan tidak memiliki beban dan peran yang sangat berat akibat bencana covid-19. Agar tidak terjadi ketimpangan gender, negara harus memberi perlindungan bagi wanita dan menghilangkan budaya patriarki yang sangat memungkinkan terjadinya ketimpangan gender bagi perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aria, B. F. 2020. *Didominasi Perempuan, Ini yang Dibutuhkan Tenaga Medis Selain APD*. Suara.com. <https://www.suara.com/health/2020/04/15/092000/didominasi-perempuan-ini-yang-dibutuhkan-tenaga-medis-selain-apd>.
- Fairuz Nadia. 2020. *Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Perempuan*. Yayasan Pulih.org. <http://yayasanpulih.org/2020/04/dampak-pandemi-covid-19-bagi-perempuan/>
- Jogloabang. 2020. *Infografis Protokol Kesehatan COVID-19*. Jogloabang. <https://www.jogloabang.com/komunitas/infografis-protokol-kesehatan-covid-19>
- Kementerian Kesehatan RI. 2020. *Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Coronavirus Disese (Covid-19)*. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P).
- Soekarno. 2001. *Sarinah : kewajiban wanita dalam perjuangan Republik Indonesia (cet 4)*. Toko Gunung Agung.
- Tambunan, L. 2020. *Dampak sosial virus corona: Beban "berlipat ganda" bagi perempuan di masa pandemi Covid-19*. BBC News Indonesia.
- United Nations Population Fund HQ. 2020. *COVID-19: A gender lens protecting sexual and reproductive*. Retrieved from www.unfpa.org.